

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Dharma, F. (2018). *Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 7(1), 1–9.
- Aguswandi, Cangara, H., & Iqbal Sultan, M. (2019). *Konstruksi Pemberitaan Partai Perindo di iNews TV*. Jurnal Pewarta Indonesia, 1(2), 157–169.
- Andrianti, N. (2015). *Peran Media Massa Nasional Dalam Politik Internasional*. Informasi, 45(1), 43.
- Azwar, A., Putra, R. P., & Uljanatunnisa, U. (2021). *Unsur Keberpihakan Pada Pemberitaan Media Online Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kampanye pada Kumparan.Com*. Jurnal Studi Jurnalistik, 3(1), 48–62.
- Cangara, H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua (Kedua)*. PT Rajagrafindo persada.
- Dharma, F. A. (2018). *Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial*. Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, 7(1), 1–9.
- Dunan, A. (2014). *Framing SBY Dalam Pemberitaan Televisi Indonesia Framing Sby Dalam Pemberitaan Televisi Indonesia Sby Framing in Television News Indonesia*. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika, 5(1), 25–37.
- Efendi, Erwan, Abdillah Taufiqurrohman, Tris Supriadi, dan Eki Kuswananda. (2023). *Teori Agenda Setting*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 1715-1718.
- Eriyanto. (2008). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS.
- Fajar, D., Ramadhani, A., & Wahyu, D. (2022). *Framing Media Online Liputan6.Com Terhadap Pemberitaan Capres Muhaimin Iskandar Pada Pilpres 2024*. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, Xii(No. 2), 44–57.
- Fani Ismail, R., Widya Budhiharti, T., Studi Ilmu Komunikasi, P., & Singaperbangsa Karawang, U. (2023). *Analisis Framing Pemberitaan Sistem Pemilu pada Portal Berita Instagram @narasinewsroom*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 26058–26062.



l, N. A. N., Wulandari, R. A., Putantri, W., & Ulya, C. (2021). *Analisis salah an Berbahasa Bidang Morfologi Pada Portal Berita Online ansinews.Com*. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 4(2), 1–352. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.3243>

Fitria Sekarini Ashri. (2019). *Analisis Framing Pemberitaan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Presiden 2019 di Liputan6.com dan Tempo.co*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Fitriningsih, & Nugroho, C. (2021). *Analisis Framing Daring Tempo.co dan Kompas.com Terhadap Kecurangan Pilpres 2019*. *Proceeding of Management*, 8(5), 6902–6916.

Frisila, A., & Hartanto, E. (2024). *Komunikasi Interpersonal Antara Manajer Dan Artis Dalam Mengembangkan Kreativitas Pada Media Sosial Tiktok Kutipan-X*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(01), 132–137.

Habibie, D. K. (2018). *Dwi Fungsi Media Massa*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79–86.

Hafil Muhammad. (2023, January 6). *Riset I2: Pemilu 2024 Jadi Isu Terbesar Media Massa Sepanjang 2022*. *Republika.Co.Id*. <https://news.republika.co.id/berita/ro17ko430/riset-i2-pemilu-2024-jadi-isuterbesar-media-massa-sepanjang-2022>

Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa* (1st ed.). Granit.

Haryati, H. (2012). *Konstruktivisme Bias gender dalam Media Massa*. *Jurnal Penelitian*, 10(1).

Ichwan Butsi, F. (2019). *Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah Dan Metodologi*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 1(2), 52–58.

Karman. (2012). *Media dan Konstruksi Realitas*. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 27–46.

Karman. (2015). *Construction Of Social Reality as Thought Movement (Theoretical Review on Social Construction of Reality)*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 5(3), 11–23.

Komala, L., & Karlina, S. (2007). *Komunikasi Massa Suatu Oengantar*. Simbiosis Rekatam Media.

Kovach, B. T. R. (2006). *Sembilan Elemen Jurnalisme* (1st ed.). Yayasan Pantau.

Kristanto, A., & Lisa, W. (2013, August 9). *Media as pillory: the power to 'name and shame' in digital times*. *The Conversation*.

Kusnanto, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (1st ed.). Kencana.



- Kusuma Habibie, D. (2018). *Dwi Fungsi Media Massa*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 7(2), 79–86.
- Malaka, T., & Brenda Maharani, A. (2023). *Pembingkajian Berita dukungan PDIP pada Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Pada Media Massa Online*. Jurnal Kajian Ilmiah, 23(3), 261–270.
- Malik, R., Iqbal Sultan, M., & Kahar. (2017). *Konstruksi Realitas Pemilu pada Di Media Online (Analisis Framing Berita Tribun Timur Online Tentang Pemilu pada Kabupaten Takalar)*. Jurnal Komunikasi Kareba, 6(2), 371–385.
- Mattalatta, A. (2017). *Partai Politik dan Pemilihan Umum dalam Sistem Presidensial Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jurnal Ketatanegaraan, 5(3), 83–88.
- McQuail. (2011). *Teori Komunikasi Massa* (6th ed.). Salemba Humanika.
- Meifitri, M., & Susanto, E. (2020). *Perubahan dari Media Lama ke Media Baru: Telaah Transformasi Platform Multimedia*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(3), 302–311.
- Mustofa, A. (2012). *Etika Pemberitaan Partai Politik Di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat Di Metro Tv Dan Tv One)*. Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna, 3(1), 15–24.
- Nensisilva. (2015, July 7). *Fungsi Komunikasi Massa*. Weblog.
- Newton Kenneth, & Deth Jan W. Van. (2021). *Tentang Media Massa: Seri Perbandingan Sistem Politik (Rizal, Ed.)*. Nusamedia.
- Ngangi, C. R. (2011). *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*. Agri-Sosioekonomi, 7(2), 1.
- Nimmo, D. (2011). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media* (2nd ed.). Goodyear Publishing Co.
- Nur Azizah, A. (2023, February 16). *Pengaruh Konten Politik di Media Sosial terhadap Opini Publik*. Kompasiana.
- Primayana, Galih Gerald. (2022). *Agenda Setting dengan Perspektif Kacamata Publik Khalayak Media*. Jurnal Citra 8(2).
- Rahmah Rani, N. (2013). *Persepsi Jurnalis dan Praktisi Humas terhadap Berita*. Ilmu Komunikasi, 10(1), 83–96.
- Unde, A. A., & Mau, M. (2023). *Komunikasi Politik Anggota DPRD Provinsi Sul-Sel pada Pemilu 2019 (Faktor Pendukung dan*



- Penghambat dalam Kampanye Politik*). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8291–8297.
- Ritonga, Elfi Yanti. (2018). *Teori Agenda setting dalam Ilmu Komunikasi*. *Jurnal Simbolika*, 4(1), 32-41.
- Saubani, A. (2023, October 16). *Ini Penjelasan Putusan MK Sehingga Mengapa Gibran Bisa Maju Jadi Cawapres*. *Republika*.
- Setianto, W. A. (2018). *Literasi Konten Radikal di Media Online*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 75–88.
- Silviana, N., & Martanto, U. (2019). *Media Dan Politik: Studi Kasus Konstruksi Citra Politik Jokowi-Ma'ruf Dan Prabowo-Sandiaga Di Koran Jawa Pos Dalam Pemilu 2019*. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(2), 94–103.
- Sulaiman, A. (2016). *Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger*. *Society*, 4(1), 15–22.
- Sulthon Muhammad. (2023, October 20). *Jika Gibran Jadi Cawapres, Pakar Sebut Jadi Contoh Demokrasi yang Buruk*. *Detik.Com*.
- Syamsul M Romli, A. (2018). *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online* (I. Kurniawan & M. A Elwa, Eds.; 2nd ed.). Nuansa Cendekia.
- Syarief, F. (2017). *Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik (Analisa Wacana Twitter Sby)*. *Jurnal Komunikasi*, 8(3), 2579–329.
- Tamburaka, A. (2013). *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Tenri Mawangi, G. (2023, October). *Prabowo umumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres*. *AntaraNews*.
- Triantanto A. Yuda, Suriyanto Adhi Dharma, Mutiah Tuty, Hardian Arvin, Kurniawan Fajar, Pane Ilham Albar, Fitri Syari, & Hamid Ali Imron. (2023). *Framing Media Online Pada Kontestasi "All The President's Men" dan Koalisi Besar Jelang Pilpres 2024*. *Nivedana Jurnal Komunikasi Dan Bahasa*, 4, 29.
- Umanailo, M. (2003). *Paradigma Konstruktivis*. https://www.researchgate.net/profile/Muhamad-Chairul-Basrun-umanailo/publication/336764265_Paradigma_Konstruktivis/links/5db09292851c8180114415/Paradigma-Konstruktivis.pdf



- Wahyingsih, E., Unde, A. A., & Akbar, Muh. (2023). *Analisis Komunikasi Politik dalam Proses Pemenangan Prabowo-Sandi di Kota Makassar pada Tahun 2019*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7067–7078.
- Wahyuni, T. (2023, September 29). *Hashim buka kandidat kuat pendamping Prabowo Subianto dari Khofifah hingga Gibran*. BBC News Indonesia.
- Wulandari, T. (2021, January 28). *Peranan Media Massa dalam Penyebaran Informasi Masyarakat*. Kompasiana.
- Yusyama, A. Y., & Khoirunnisa, R. (2021). *Analisis Wacana Kritis Pada Media Massa Daring (Online) Bantennews.co.id Kolom Hukum Edisi Februari 2021*. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 11(1), 15.



LAMPIRAN I

DATA BERITA KOMPAS.COM



Gibran Cawapres Prabowo Masuk Berita Media Asing

Kompas.com - 23/10/2023, 09:33 WIB

Penulis: Aditya Jaya Iswara

KOMPAS.com - Media asing turut memberitakan Gibran Rakabuming Raka (36) menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi bacapres Prabowo Subianto (72) untuk pemilu Indonesia 2024.

Prabowo yang merupakan ketua umum Partai Gerindra mengumumkan Gibran sebagai bacapresnya pada Minggu (22/10/2023) malam.

Pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, sejumlah media asing memberitakan Gibran menjadi cawapres Prabowo, di antaranya adalah AFP, Reuters, dan Nikkei Asia.

1. AFP

Kantor berita yang berbasis di Perancis ini memasang judul Prabowo picks Indonesia president's son as election running mate di beritanya.

Agence France-Presse (AFP) menyebutkan bahwa Gibran yang berusia 36 tahun kini sedang menjabat Wali Kota Surakarta.

Diberitakan pula bahwa pemilu 2024 akan menjadi kali ketiga Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden setelah kalah dari Jokowi dalam dua pemilihan sebelumnya.

AFP turut mencantumkan dua bacapres lainnya yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Lebih dari 204 juta pemilih yang memenuhi syarat diperkirakan akan memberikan suara mereka pada 14 Februari," tulis AFP. "Pemenangnya akan mengambil alih kepemimpinan Jokowi setelah dua periode menjabat, sejak pemilu pertamanya pada 2014."

2. Reuters

Sementara itu, Reuters memberitakan bahwa penunjukan Gibran--anak sulung Presiden Joko Widodo--dapat meningkatkan suara bagi Prabowo karena popularitas Jokowi sangat besar.

Media yang berkantor pusat di London ini melaporkan, Prabowo memimpin sebagian besar polling tahun ini, termasuk dua polling pekan lalu yang selisih tipis dengan Ganjar di urutan kedua dan Anies di posisi ketiga.

"Ganjar dan Anies, keduanya berusia 54 tahun, telah mendaftar untuk mencalonkan diri pada Kamis (19/10/2023), hari pembukaan pendaftaran calon presiden," tulis Reuters di Indonesia presidential candidate Prabowo picks Jokowi's son as running gistrasi capres dan cawapres pemilu 2024 dibuka sampai 25 Oktober 2023 (pemilihan Umum).



Memasang judul Jokowi's eldest son to make Indonesia vice presidential bid, media yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang, ini menyoroti rekam jejak Gibran yang pernah menempuh studi di Singapura dan Australia, kemudian memulai bisnis sebelum terjun ke politik pada 2019.

"Subianto (72), yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua Partai Gerindra, menambahkan bahwa mereka akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada Rabu sebelum masa pendaftaran berakhir," lanjut tulisan Nikkei Asia.

Baik AFP, Reuters, dan Nikkei Asia sama-sama memberitakan Gibran dapat menjadi cawapres Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Gibran Jadi Cawapres Prabowo dan Reformasi yang Diputar Balik

Kompas.com - 23/10/2023, 05:45 WIB

Editor: Aryo Putranto Saptohutomo

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto seakan memutar balik Reformasi kembali ke masa lalu.

"25 tahun telah berlalu, pada saat kita akan mencapai tahap kematangan berdemokrasi atau demokrasi substansial yang mapan, tiba-tiba kita dikejutkan oleh adanya gerakan untuk memutar balik arah reformasi ke era sebelum reformasi," kata pakar politik Ikrar Nusa Bhakti dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu (22/10/2023).

Ikrar adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam kelompok yang menerbitkan Maklumat Juanda menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres yang kontroversial.

Presiden Jokowi, kata Ikrar, selalu beralasan tidak berwenang urusan koalisi atau penentuan siapa menjadi capres/cawapres adalah urusan ketua-ketua umum partai dan bukan urusan presiden.

Akan tetapi, lanjut Ikrar, ketika Presiden Jokowi tidak mencegah anaknya untuk menjadi cawapres Prabowo atau capres lain, maka hal itu berarti membiarkan praktik demokrasi tidak baik terjadi Kembali di Indonesia.

Menurut Ikrar, para politikus penggagas reformasi seperti Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan (alm) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sepakat gerakan reformasi politik di Indonesia sudah sampai pada tahap tidak akan kembali (the point of no return) ke masa Orde Baru.

Akan tetapi, lanjut Ikrar, kesepakatan itu seolah dikesampingkan setelah MK menyetujui opsi yang memberi peluang Gibran, yang juga Wali Kota Solo, bisa dijadikan cawapres Prabowo Subianto.



Rekrutmen politiknya instan, tanpa proses kaderisasi, Gibran dapat menjadi cawapres Prabowo," ucap Ikrar.

Pada Sabtu (21/10/2023), Partai Golkar sepakat mendukung Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo.

Menurut Ikrar, sebenarnya keputusan itu adalah suatu penghinaan bagi kader-kader Partai Golkar, dan partai-partai koalisi lainnya yang tidak memiliki kesempatan emas tersebut.

"Jika Gibran bukan anak presiden, tidak mungkin dia akan memiliki hak privilege dan esoknya diangkat menjadi cawapres," ucap Ikrar.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo yang merupakan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan Gibran sebagai bakal cawapresnya.

Prabowo yang sedang menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra mengumumkan keputusan itu usai semua ketua umum partai politik di KIM menggelar rapat di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembung secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Minggu.

Dalam pengumuman itu Gibran justru tidak hadir. Prabowo mengatakan, keputusan memilih Gibran sebagai bakal cawapresnya diputuskan secara bulat dan aklamasi.

Prabowo mengatakan, dia beserta Gibran dengan didampingi para petinggi KIM akan mendaftar sebagai pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023) mendatang.

Sebelumnya, Partai Golkar mengumumkan secara resmi dukungan mereka kepada Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang diselenggarakan pada Sabtu (21/10/2023) kemarin.

Sampai saat ini terdapat 8 partai politik yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.

Gibran sebelumnya sempat dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Gibran juga dikabarkan telah bertemu Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, pada Jumat (20/10/2023) lalu.

Peluang Gibran menjadi cawapres terbuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan soal batas usia calon presiden (capres) dan cawapres adalah 40 tahun sebagai aturan yang inkonstitusional bersyarat sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.



40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres bukan syarat

rang yang belum 40 tahun, selama pernah/sedang menjadi kepala daerah legislatif, ia bisa maju sebagai capres-cawapres.

Presiden Jokowi menyatakan merestui langkah Gibran buat ikut menjadi peserta di Pilpres 2024.

Hal tersebut diungkapkan, Jokowi setelah memimpin Apel Hari Santri Nasional 2023, di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (22/10/2023), pagi.

"Ya orangtuanya tugasnya hanya mendoakan dan merestui," kata Jokowi, saat ditemui awakmedia, di Tugu Pahlawan Surabaya.

Selain itu, Jokowi mengungkapkan, perihal tawaran cawapres merupakan urusan pribadi anaknya. Dengan demikian, dia tak ingin mempengaruhi setiap keputusan putra sulungnya tersebut.

"Keputusan semua sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," jelasnya.

Gibran Jadi Cawapres Prabowo Dianggap Bukan Teladan Politik Generasi Muda

Kompas.com - 23/10/2023, 06:00 WIB

Editor: Aryo Putranto Sptohtomo

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan resmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) kepada anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto dianggap contoh buruk cara berpolitik bagi generasi muda di Indonesia.

Kritik itu disampaikan oleh pakar politik Ikrar Nusa Bhakti. Dia juga merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam kelompok yang menerbitkan Maklumat Juanda menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres yang kontroversial.

"Ini menjadi contoh buruk bagi generasi muda Indonesia. Seakan tidak ada kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi anak-anak muda Indonesia bahwa mereka bisa melalui masa pengkaderan dan meniti karir di partai, agar mendapatkan kematangan berpolitik yang baik," kata Ikrar dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu (22/10/2023).

Menurut Ikrar, semestinya Gibran memupuk pengalaman dan menempa karier politik seperti kader partai politik pada umumnya, yakni dengan berbakti menjadi anggota partai politik, bersaing dalam pemilihan memperebutkan jabatan publik, dan menjalankan tugas sebagai pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat hingga tuntas.

Selain itu, kata Ikrar, seharusnya Gibran memupuk pengalaman sebagai pejabat publik secara berjenjang, dan tidak meloncat dan langsung bersaing di pemilihan presiden.

"Kalau Gibran anak orang kebanyakan, ia tentunya juga tidak dapat melenggang santai untuk mendapatkan kursi wakil presiden," ujar Ikrar.

Keputusan penetapan Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo juga dinilai merusak proses esia, yang diperkirakan baru mencapai titik matang pada 2039 mendatang.



eritakan, Prabowo yang merupakan bakal calon presiden yang diusung a Maju (KIM) mengumumkan Gibran sebagai bakal cawapresnya.

Prabowo yang sedang menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra mengumumkan keputusan itu usai semua ketua umum partai politik di KIM menggelar rapat di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembung secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Minggu.

Dalam pengumuman itu Gibran justru tidak hadir. Prabowo mengatakan, keputusan memilih Gibran sebagai bakal cawapresnya diputuskan secara bulat dan aklamasi.

Prabowo mengatakan, dia beserta Gibran dengan didampingi para petinggi KIM akan mendaftar sebagai pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023) mendatang.

Sebelumnya, Partai Golkar mengumumkan secara resmi dukungan mereka kepada Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang diselenggarakan pada Sabtu (21/10/2023) kemarin.

Sampai saat ini terdapat 8 partai politik yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.

Gibran sebelumnya sempat dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar demi memuluskan jalannya menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Gibran juga dikabarkan telah bertemu Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, pada Jumat (20/10/2023) lalu.

Peluang Gibran menjadi cawapres terbuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan soal batas usia calon presiden (capres) dan cawapres adalah 40 tahun sebagai aturan yang inkonstitusional bersyarat sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Artinya, usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres bukan syarat mutlak. Kini, siapa pun orang yang belum 40 tahun, selama pernah/sedang menjadi kepala daerah atau anggota legislatif, ia bisa maju sebagai capres-cawapres.

Presiden Jokowi menyatakan merestui langkah Gibran buat ikut menjadi peserta di Pilpres 2024.

Hal tersebut diungkapkan, Jokowi setelah memimpin Apel Hari Santri Nasional 2023, di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (22/10/2023), pagi.

"Ya orangtuanya tugasnya hanya mendoakan dan merestui," kata Jokowi, saat ditemui awakmedia, di Tugu Pahlawan Surabaya.



vi mengungkapkan, perihal tawaran cawapres merupakan urusan pribadi n demikian, dia tak ingin mempengaruhi setiap keputusan putra sulungnya

nya sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah anak-anak kita," jelasnya.

Sikap Tenang PDI-P Usai Manuver Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 23/10/2023, 06:54 WIB

Tim Redaksi: Nicholas Ryan Aditya, Bagus Santosa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi dideklarasikan menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.

Deklarasi yang diumumkan oleh bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto itu tanpa dihadiri oleh Gibran, Minggu (22/10/2023) malam di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru.

Diketahui, Gibran adalah kader PDI-P. Partai politik penampung Gibran itu sudah mengusung sosok lain, yaitu Ganjar Pranowo sebagai bacapres dan Mahfud MD sebagai bacawapresnya.

Sebelum dideklarasikan oleh Prabowo dan KIM, Gibran terlebih dulu diusulkan sebagai cawapres Prabowo oleh Partai Golkar. Itu terjadi sehari sebelum deklarasi, Sabtu (21/10/2023) saat partai beringin menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Gibran turut hadir dan mengapresiasi keputusan Rapimnas Golkar yang mengusulkan dirinya mendampingi Prabowo.

PDI-P tak berkomentar

Setelah Gibran dideklarasikan Golkar sebagai bacawapres pendamping Prabowo, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengomentari hal tersebut.

Sabtu, kemarin, Puan mengakui dirinya sudah bertemu Gibran pada Jumat (20/10/2023) malam.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPR RI ini juga akhirnya mengetahui bahwa ada kemungkinan Gibran maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun demikian, kata Puan, tiada terucap kata permohonan untuk mengundurkan diri Gibran dari PDI-P.

Meski sudah mendengarkan keterangan dari Gibran, Puan mengaku partainya belum bisa bersikap.

"Dari Partai Golkar meminta (Gibran) untuk bisa jadi cawapres. Namun bagaimana setelah ini? Belum ada keputusan. Jadi saya belum bisa mengucap apa-apa," tutur Puan di Surabaya, Sabtu.

Sementara itu, politikus PDI-P yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI-P (TKRPP PDI-P) Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa PDI-P menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sikap Gibran tersebut.



ap PDI-P yang disampaikan melalui Puan bahwa belum bisa mengucap pun sudah cukup jelas. "Kita tunggu dan lihat saja dan biar masyarakat ar Deddy kepada Kompas.com, Minggu.

Deddy juga senada dengan Puan yang mengaku tak tahu soal kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari PDI-P. "Setahu saya belum mengundurkan diri, hanya memberitahu ada kemungkinan ikut pilpres," jelas anggota Komisi VI DPR ini.

Sementara itu, bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo dan bakal cawapres Mahfud MD menanggapi santai soal Gibran ini.

Keduanya sepakat menerima ketika Gibran benar maju dan akan menjadi rival atau lawan pada Pilpres 2024.

"Jadi selamat, mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat, dan menyenangkan," kata Ganjar di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Jalan Cemara, Jakarta, Minggu.

Jokowi disebut tak hormati kaderisasi PDI-P

Majunya Gibran pada Pilpres 2024 mau tidak mau juga disebut-sebut atas peran sang ayah, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, Jokowi merestui Gibran maju pada Pilpres 2024. Padahal, keduanya adalah kader PDI-P.

Melihat hal ini, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai bahwa Jokowi bisa diartikan tidak menggubris lagi aturan berpartai. Terutama, ketaatan dalam mematuhi instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Serta tidak menghormati kaderisasi di partai yang membesarkan Jokowi dan keluarganya," kata Ari kepada Kompas.com, Minggu.

Ari berpendapat, jika Gibran benar maju dalam Pilpres, bakal ada asumsi adanya ketamakkan dari keluarga Jokowi untuk berkuasa.

Menurut dia, jelas ini adalah suatu ancaman bagi demokrasi. Dia pun menyoroti bagaimana rentetan peristiwa sebelum Gibran resmi dideklarasikan sebagai cawapres, yang dimula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia minimum capres-cawapres.

"Cara-cara yang dilakukan rezim yang tamak kekuasaan itu begitu jelas dengan membegal konstitusi di MK dan pengerahan yang masif aparat yang memihak," ujar dia.

"Saya jadi pesimis penyelenggaraan Pilpres bisa berjalan luber dan jurdil," tutupnya.

Gibran Cawapres Prabowo, PDI-P Bisa Evaluasi Jokowi dan Tarik Para Menteri

Kompas.com - 24/10/2023, 10:33 WIB

Penulis: Fitria Chusna Farisa

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan PDI Perjuangan dengan keluarga Presiden Joko Widodo diprediksi memanas usai putra sulung Jokowi yang juga kader PDI-P, Gibran Rakabuming Raka, dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.



tif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad menilai, manuver tersebut mungkin berimbas pada posisi Jokowi di internal

utup peluang PDI-P mencabut dukungan politik dari pemerintahan Jokowi, askan semua jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Mengingat pencawapresan Gibran besar kemungkinan atas cawe-cawe Jokowi selaku ayahanda Gibran, maka membuka peluang PDI-P juga untuk mengevaluasi status ‘petugas partai’ yang disandang oleh Jokowi,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

“Salah satu langkah paling ekstrem yang bisa diambil PDI-P sebagai nota protes adalah mencabut dukungan politik dari pemerintahan Jokowi dan melepaskan semua jabatan posisi menteri di kabinet,” tuturnya.

Umam yakin, dinamika politik ini akan membuat PDI-P merasa dilangkahi, atau bahkan dikhianati oleh keluarga Jokowi.

Apalagi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sedianya telah mewanti-wanti jajarannya untuk tak melakukan manuver politik. Katanya, kader yang bermanuver bakal dipecat.

Merujuk langkah cepat partai banteng memecat sejumlah kader yang dianggap membelot seperti Budiman Sudjatmiko dan Murad Ismail, kata Umam, seharusnya, tak butuh waktu lama buat PDI-P mendepak Gibran.

“Jika konsisten pada aturan dan konstitusi partai, PDI-P tidak perlu menunggu surat pengunduran diri dari kadernya yang dianggap tidak loyal pada sikap dan keputusan partai,” ujarnya.

Namun, Umam menduga, PDI-P masih ragu memecat Gibran karena hal itu akan mengganggu hubungan baik dengan keluarga besar Jokowi, sosok yang turut melambungkan nama partai banteng.

Hingga kini, Megawati pun dianggap masih gamang lantaran tidak siap berhadapan dengan Jokowi yang tengah memegang kekuasaan.

“Jika PDI-P ternyata bersikap lunak pada langkah politik Gibran dan Jokowi, maka PDI-P bisa dituding tebang pilih, gamang atau tidak siap untuk berhadapan dengan kekuasaan yang saat ini masih dikendalikan oleh tangan Jokowi,” kata Umam.

“Artinya, saat ini PDI-P tampaknya masih mencoba untuk menakar secara matang sikap dan keputusan politik yang terukur seperti apa yang akan dikeluarkan untuk menyikapi ‘mbalelo’-nya keluarga Jokowi” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengumumkan nama Gibran sebagai bakal cawapres pendampingnya untuk Pemilu 2024.

Nama Gibran diumumkan usai para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo, Minggu (22/10/2023). Namun, Gibran tak hadir dalam deklarasi itu.

“Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembung secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Prabowo tak hadir di acara deklarasi, Gerindra mengeklaim politikus PDI-P itu telah bergabung dengan Prabowo.



Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, segala persyaratan untuk Gibran menjadi cawapres Prabowo sudah disiapkan. Keduanya bakal mendaftar sebagai capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023 mendatang. "Iyalah, persyaratan sudah siap," ujar Dasco saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Jokowi Izinkan Gibran Maju Jadi Cawapres di Pilpres 2024

Kompas.com - 24/10/2023, 19:17 WIB

Tim Redaksi: Dian Erika Nugraheny, Dani Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui surat permohonan yang diajukan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Ari, surat persetujuan sudah disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno.

"Presiden melalui surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 24 Oktober 2023 telah menyetujui permohonan izin Wali Kota Solo untuk diajukan sebagai cawapres oleh gabungan parpol," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Selasa (24/10/2023).

"Persetujuan ini dikeluarkan sebagai jawaban permohonan Wali Kota Solo yang diajukan melalui surat tertanggal 23 Oktober 2023," tuturnya.

Sebelumnya, Gibran telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta izin maju sebagai cawapres.

Surat itu pun telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 24 Oktober 2023.

Sebagaimana diketahui, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra sulung Presiden Jokowi telah dideklarasikan sebagai bakal cawapres untuk bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Keduanya didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Prabowo dan Gibran rencananya akan mendaftarkan diri sebagaimana capres dan cawapres peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (25/10/2023).

Sebelumnya, KPU mengingatkan kepala daerah yang hendak mengajukan diri sebagai capres atau cawapres harus meminta izin kepada presiden.

Perihal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU RI yang menyampaikan konferensi pers merespons putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XXI/2023.



tidak bolehkan seseorang dengan usia di bawah usia 40 tahun menjadi calon wakil presiden dengan catatan pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pemilu.

“(Kepala daerah yang akan mendaftar sebagai) calon presiden dan calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden,” kata Idham dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Adapun kepala daerah tersebut meliputi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Idham menjelaskan, ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 171 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selanjutnya, berdasarkan Ayat 4 undang-undang itu, kata Idham, surat permintaan izin kepada presiden tersebut harus disampaikan ke KPU.

Gibran Jadi Cawapres Prabowo, PDI-P Ditengarai "Bermain 2 Kaki"

Kompas.com - 25/10/2023, 06:05 WIB

Editor: Aryo Putranto Saptohutomo

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diperkirakan tidak bakal mendepak anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming, dari keanggotaan partai setelah diusung menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.

Jika hal itu dilakukan oleh PDI-P maka dinilai bisa menutup peluang partai itu masuk kembali ke lingkaran kekuasaan, jika pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Boleh jadi pemecatan terang-terangan juga berpeluang menutup pintu bagi PDI-P untuk tetap berada di dalam pemerintahan jika Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan Presiden 2024," kata pengamat politik Jannus TH Siahaan saat dihubungi pada Selasa (24/10/2023).

"Jadi dengan tetap mempertahankan status Gibran sebagai kader, jika Gibran berhasil masuk Istana, statusnya adalah sebagai kader PDI-P," sambung Jannus.

Jannus memperkirakan, jika PDI-P langsung memecat Gibran seperti yang dilakukan terhadap Budiman Sudjatmiko justru akan memberikan pembenaran terhadap isu keretakan hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Di sisi lain, jika PDI-P memecat Gibran justru bisa menyulut reaksi masyarakat buat mempertanyakan keberadaan PDI-P di dalam pemerintahan dan keberadaan menteri-menteri asal PDI-P di kabinet pemerintahan Jokowi.

"Lalu akhirnya akan membuat hubungan Megawati dan Jokowi seperti halnya realitas hubungan Surya Paloh dengan Megawati," ucap Jannus.

Persoalan lainnya, kata Jannus, jika PDI-P memecat Gibran saat ini maka hal itu sama saja memicu konflik terbuka antara Megawati dan Presiden Jokowi.



li, posisi PDI-P secara politik dianggap semakin rentan terpojok.

siden Jokowi bisa saja menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk melakukan berbagai tekanan kepada PDI-P dan kader-kader PDI-P. i fakta yang dialami oleh Partai Nasdem," papar Jannus.

PDI-P dianggap memahami posisi Gibran yang merupakan salah satu kader mereka kuat secara politik.

Sebab Gibran yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo didukung ayahnya, Presiden Joko Widodo, para pendukungnya dan pendukung sang ayah, serta partai politik pengusung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sampai saat ini terdapat 8 partai politik yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.

Sedangkan PDI-P bersama partai politik mitra koalisinya juga mengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Megawati jauh-jauh hari sudah memperingatkan supaya kadernya tidak bersikap mendua menjelang pemilihan umum dan presiden.

Bahkan dia mengancam akan kader yang bermanuver di luar ketetapan partai dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres.

Pasangan Prabowo-Gibran dijadwalkan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023).

Sedangkan bakal capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sudah mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis (19/10/2023) lalu.

Gibran Bantah Iriana "Cawe-cawe" untuk Muluskan Jalannya Maju Pilpres 2024
Kompas.com - 20/11/2023, 10:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya, Icha Rastika Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, membantah kabar bahwa ibunya, Iriana Joko Widodo, turut cawe-cawe atau ikut campur demi memuluskan jalannya dalam Pilpres 2024.

Gibran menepis informasi bahwa ibunya bertemu dengan relawan dari kelompok pengusaha.

"Enggak benar. Tanya saja ke relawan, pernah enggak ketemu," ujar Gibran ditemui di Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023) malam.

"Oh, (relawan) Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) apalagi, enggak pernah," ucap putra sulung Presiden Jokowi itu.

Dia lantas bertanya siapa yang menghembuskan isu tentang Iriana turut cawe-cawe tersebut.



gakhiri sesi wawancara dengan awak media dan meninggalkan area TIM

lam laporan sebuah media massa, disebutkan adanya peran Iriana di balik anan Gibran sebagai cawapres Prabowo.

Iriana juga disebut melobi keluarga besarnya di Solo dan Yogyakarta untuk mendukung Gibran.

Pada 22 Oktober, atau sebelum Gibran dideklarasikan sebagai calon wakil presiden, Iriana menunjukkan dukungannya atas usulan tersebut.

Ibu Negara tampak mengacungkan jempolnya ketika ditanya terkait restu untuk anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan akan maju sebagai cawapres di Pilpres 2024.

Awalnya, Iriana turut menemani Presiden Jokowi yang menjadi inspektur saat Apel Hari Santri Nasional 2023 di lapangan Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (22/10/2023).

Saat acara selesai, Iriana yang mengenakan pakaian dan hijab berwarna putih, tampak menyalami sejumlah santri.

Melihat itu, sejumlah awak media yang meliput acara tersebut langsung melemparkan pertanyaan, terkait apakah Iriana merestui Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024.

Iriana pun merespons pertanyaan tersebut dengan mengacungkan jempolnya sambil tersenyum.

Dia tak mengucapkan sepatah kata dan langsung pergi dengan kawalan Paspampres.

Sementara itu, Presiden Jokowi memberikan doa dan restu kepada putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang ramai dikabarkan menjadi cawapres untuk menemani Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam acara yang sama dengan Iriana.



LAMPIRAN II

DATA BERITA DETIK.COM



Gibran Cawapres, Gus Hans: Isu Dinasti di Negara Demokrasi Tak Relevan

Anggita – detikNews

Senin, 23 Okt 2023 14:02 WIB

Jakarta - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) 2024 mendampingi bakal capres 2024 Prabowo Subianto. Pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang Zahrul Azhar (Gus Hans) mengucapkan rasa syukur. Gus Hans mengatakan kehadiran Gibran adalah wujud demokrasi yang sesungguhnya, karena tidak membatasi partisipasi anak muda di kepemimpinan nasional.

"Alhamdulillah, tidak ada kata lain selain alhamdulillah terpilihnya sosok anak muda yang bisa berkontestasi untuk membangun negeri ini. Saya terima kasih kepada Pak Prabowo yang telah mempercayakan anak muda sebagai pendampingnya, dan ini bisa menyehatkan kehidupan berpolitik di Indonesia, terutama kepada anak muda. Ada optimisme bahwa siapapun, dalam usia berapa pun, asal dia matang, dia memiliki hak yang sama dalam membangun negeri ini," kata Gus Hans dalam keterangan tertulis, Senin (23/10/2023).

Gus Hans memandang Gibran sebagai anak muda yang menginspirasi. Dia pun tidak sepakat jika majunya Gibran di Pilpres 2024 dicap dinasti politik.

"Saya melihat Mas Gibran adalah sosok anak muda yang bisa memberikan inspirasi bagi anak muda yang lain. Bangsa ini akan semakin matang, tidak terjebak dalam politik dinasti atau apapun istilahnya yang membuat orang itu atau satu orang tidak memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain. Artinya siapapun mereka berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dalam kehidupan berpolitik. Sehingga siapapun bisa, mau anaknya petani, presiden, tentara, PNS, dan sebagainya memiliki kesempatan yang sama," ujar Gus Hans.

Soal isu dinasti politik, Gus Hans menjelaskan Indonesia adalah negara demokrasi yang menerapkan sistem pemilihan umum (pemilu) dalam memilih pemimpin. Sementara dinasti politik, artinya penunjukkan pemimpin yang tidak dilalui proses pemilihan umum atau ditentukan sepihak.

"Tidak relevan kita bicara politik dinasti di negara demokrasi, kecuali kita tinggal di Korea Utara yang (kepemimpinannya-red) habis dari bapaknya ke anaknya tanpa proses pemilihan dan ditentukan sendiri, itu bisa jadi politik dinasti. Di Singapura, di Kanada, di Kanada, PM (perdana menteri)-nya kan juga mantan anak Presiden," jelas Gus Hans.

"Di negara yang mengklaim dirinya paling demokrasi, contohnya Amerika, itu ada George Bush dan Geroge W Bush. Apa lalu dicap sebagai politik dinasti? Ya nggak lah, kecuali tidak ada proses pemilihan. Kita fair-fair-an saja, berapa banyak anak dari politisi, pemimpin negara tidak bisa meneruskan kebaikan yang dilakukan orang tuanya? Yang justru gagal mencapai karier karena narkoba dan sebagainya. kalau misalnya ada orang tua yang baik dan dilanjut dengan hal-hal baik oleh anaknya, kan malah bagus," sambung Gus Hans.

Gus Hans kemudian menyampaikan rasa senangnya terhadap ketiga pasangan bakal calon presiden dan wapres 2024. Dia menyebut masing-masing pasangan calon memiliki darah Nahdlatul Ulama (NU).



1 melihat, saya sebagai nahdliyin merasa senang, gembira karena ketiga stan semua memiliki darah NU, keikatan ke-NU-an yang sangat kuat. Di nin atau Muhaimin yaitu NU dzurriyah, Mas Ganjar ada Mahfud MD yang IU intelektual, dan ketiga Mas Gibran NU kultural yang kesehariannya naliyah 2 NU, dan mungkin belum terlibat dalam aktivitas secara struktural.

Jumlah kultural jauh lebih banyak daripada jumlah struktural," ungkap Gus Hans.

Terakhir, Gus Hans mengucapkan selamat kepada para peserta Pilpres 2024. Dia harap Pilpres 2024 membawa angin segar bagi politik dan ekonomi bangsa.

"Selamat untuk ketiga calon ini karena mereka melibatkan warga nahdliyin untuk berkontestasi, jadi warga NU tidak perlu bingung-bingung milih siapa. Mudah-mudahan tidak ada lagi isu-isu tentang SARA, isu-isu tidak penting, isu-isu yang sudah menjadi keputusan ikrah. sehingga kita fokus ke depan, mudah2an kampanye lancar, pelaksanaan pilpres membawa angin segar bagi perpolitikan dan ekonomi Indonesia," pungkas Gus Hans.

Jokowi Izinkan Gibran Maju Jadi Cawapres Prabowo

Eva Safitri – detikNews

Selasa, 24 Okt 2023 19:24 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat yang diajukan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait perizinan menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Surat itu disetujui Jokowi per tanggal 24 Oktober 2023. "Presiden melalui surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 24 Oktober 2023 telah menyetujui permohonan izin Wali Kota Solo untuk diajukan sebagai cawapres oleh gabungan parpol," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Selasa (24/10/2023).

Ari mengatakan persetujuan itu dikeluarkan atas permohonan izin Gibran maju cawapres. Diketahui, Prabowo-Gibran akan daftar sebagai capres-cawapres ke KPU besok.

"Persetujuan ini dikeluarkan sebagai jawaban permohonan Walikota Solo yang diajukan melalui surat tertanggal 23 Oktober 2023," ujar Ari.

Diketahui, Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, telah diumumkan menjadi cawapres oleh Prabowo Subianto. Gibran meminta doa agar pendaftaran Pilpres 2024 di KPU besok berjalan lancar.

"Ya doakan ya, semoga lancar semua," kata Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo, dikutip detikJateng, Selasa (24/10).

Gibran menjawab pertanyaan wartawan soal persiapannya jelang pendaftaran ke KPU pada Rabu (25/10) besok.

Gibran tak bicara banyak terkait rencana pendaftaran di KPU besok. Dia juga tak menjawab soal kapan bakal terbang ke Jakarta.

"(Berangkat Jakarta kapan?) Paripurna yok, paripurna dulu ya," ujar Gibran sambil masuk ke mobil hendak ke DPRD Solo untuk mengikuti rapat paripurna.

Lebih lanjut, Gibran juga ditanya soal restu maju Pilpres dari ayahnya, Presiden Jokowi. Gibran tidak menjawab secara gamblang.

," ucap putra sulung Jokowi itu.



Prabowo soal Status Gibran: Kita Senang Saja Kalau Tetap Kader PDIP

Kurniawan Fadilah – detikNews

Selasa, 24 Okt 2023 21:30 WIB

Jakarta - Bacapres Prabowo Subianto mengaku belum mengetahui status keanggotaan bacawapresnya Gibran Rakabuming Raka di PDIP. Tapi, Prabowo mengaku tidak masalah jika Gibran masih sebagai kader PDIP.

"Kalau saya sendiri belum (tahu) jelas ya, apakah beliau keluar atau tidak keluar. Kami tidak ada masalah, karena memang kami rasa bagus," kata Prabowo kepada wartawan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).

Prabowo menilai jika memang Gibran masih sebagai kader PDIP menandakan bahwa hubungan antar partai begitu erat. Prabowo mengaku merasa senang-senang saja.

"Jadi kami menganggap semua partai adalah rekan seperjuangan, sama-sama anak bangsa Indonesia. Jadi tidak ada masalah, jadi kita senang saja kalau beliau tetap jadi kader PDIP," ujar Prabowo.

Gibran Otomatis Dicabut dari PDIP

PDIP buka suara soal status Gibran Rakabuming Raka di partai usai diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) jadi cawapres Prabowo Subianto. Apakah Gibran akan dipecat?

Ketua Badan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun awalnya mengatakan pihaknya selalu mengikuti kabar terkait Gibran yang digadang-gadang jadi cawapres. Dia menyoroti secara khusus kedatangan Gibran ke rakernas Golkar.

"Dalam perjalanan akhir-akhir ini, kita mengikuti kabar, tapi terakhir kan resmi diumumkan oleh Golkar dalam rakernas Golkar, dan beliau sendiri kan hadir Rakernas dan menerima rekomendasi kan dari Golkar," kata Komarudin kepada wartawan, Senin (23/10).

"Selanjutnya beliau menyampaikan akan berkoordinasi dengan Pak Prabowo, lalu terakhir kemarin malam kan pertemuan koalisi sebelah di bawah pimpinan Gerindra mengumumkan resmi mendukung Mas Gibran jadi cawapres, dan rencana akan mendaftarkan ke KPU," lanjutnya.

Komarudin mengatakan jika Gibran bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, maka keanggotaan Gibran di PDIP akan dicabut. Dia menyebut aturan itu sudah berlaku otomatis.

"Nah kalau dalam aturan PDIP ya itu otomatis, kalau dia memilih bergabung ke sana, maka keanggotaan PDIP pasti dicabut kan gitu," ujarnya.

PDIP Ingatkan Etika Politik Gibran: Harus Mengundurkan Diri

Dwi Rahmawati – detikNews

Kamis, 26 Okt 2023 21:45 WIB



Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah buka suara terkait keputusan Wali an Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Basarah soal etika politik hingga menyebut semestinya Gibran mengundurkan diri

telah mengambil langkah di luar rule of game partai, bicara di atas semua politik. Etika politik itu lah yang sebenarnya sekarang harus dilaksanakan

oleh Mas Gibran sendiri," kata Ahmad Basarah di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Basarah mengatakan dalam organisasi apapun ada aturan main bagi setiap anggotanya. Termasuk saat mengambil langkah-langkah yang di luar kebijakan partai.

"Tadi dalam konteks aturan dalam berpartai itu Mas Gibran selaku kader partai apalagi yang sudah mendapatkan tugas sebagai Wali Kota Solo, dia harusnya tahu persis aturan main dalam organisasi partainya PDI Perjuangan mulai dari ADRT," ungkap Basarah.

Lantaran langkah yang diambil Gibran berbeda dengan partai maka dengan sendirinya dia keluar dari PDIP. Basarah mendesak Gibran untuk mengundurkan diri.

"Maka setelah dia mengambil sikap, mengambil keluar dari aturan resmi partai, yang tersisa dari Mas Gibran itu adalah sebuah etika politik harusnya dia mengundurkan diri secara resmi ketika dia mengambil keputusan keluar dari keputusan PDIP melalui hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri," pungkasnya.

Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon di Pemilu 2024 kemarin. Kedua pasangan ini juga telah melalaikan tes pemeriksaan kesehatan hari ini di RSPAD Gatot Subroto.

Pada Rabu (25/10) lalu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan Gibran belum memberikan surat pengunduran diri. Gibran mengatakan terkait kartu tanda anggota (KTA) di PDIP sudah clear. "Itu sudah clear lho. Sudah clear," kata Gibran kepada wartawan usai pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, tadi.

Gibran tak menjelaskan detail terkait status clear yang dimaksud. Dia mengatakan sudah menjawab hal tersebut sejak minggu lalu. "Kan sudah saya jawab dari minggu lalu, dari minggu lalu, sudah dari minggu lalu pertemuannya," ujarnya.

Hashim soal Gibran Terlalu Muda: Jenderal Sudirman Jadi Panglima Besar Usia 30

Devi Puspitasari – detikNews

Minggu, 29 Okt 2023 14:24 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, tak sepakat dengan anggapan bahwa umur bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka masih terlalu muda. Dia mengungkit Jenderal Sudirman berusia 30 tahun saat diangkat menjadi Panglima Besar.

"Ada yang bilang Mas Gibran terlalu muda, ada yang bilang Pak Prabowo terlalu tua. Tapi saya mau sampaikan khususnya kepada generasi muda, jangan anggap itu kebenaran, tidak ada yang terlalu muda untuk memimpin suatu Republik Indonesia, tidak ada yang terlalu tua," kata Hashim kepada wartawan di Tapos, Depok, Jawa Barat (Jabar), Minggu (29/10/2023).

Hashim pun membahas soal perjuangan Jenderal Sudirman yang menjadi Panglima Besar ahun.



bu-ibu masih inget Jenderal Sudirman? Tahu dari sejarah? Saudara-gak waktu Jenderal Sudirman diangkat sebagai panglima besar TNI dia ? Ada tahu? Panglima Besar Sudirman diangkat sebagai panglima besar rumur 30 tahun," katanya.

Menurut Hashim, munculnya Gibran sebagai bakal cawapres paling muda menjadi fakta sejarah. Dia lalu membandingkan tokoh senior yang berusia lebih tua tetapi seorang koruptor.

"Mas Gibran saat ini berumur 36 tahun saudara-saudara, itu fakta sejarah. Kalau ada yang bilang 'oh terlalu muda untuk memimpin' itu tidak benar, yang penting niatnya yang penting kejujurannya daripada kita pilih orang tua-orang tua yang koruptor-koruptor," kata pria yang merupakan adik Prabowo itu.

"Kita pilih yang muda yang bersih yang tulus yang mau mengabdikan untuk Republik Indonesia. Lebih baik muda dan jujur daripada tua yang koruptor-koruptor," lanjutnya.

Dia pun meyakini Gibran akan menjadi wakil presiden yang akan membantu Prabowo sebagai presiden untuk menuju Indonesia yang lebih makmur.

"Dan insyaAllah nanti Mas Gibran menjadi wakil presiden Republik Indonesia dan bisa membantu Pak Prabowo sebagai presiden untuk menuju Indonesia ke masa depan yang makmur, masa depan yang sejahtera, InsyaAllah, Bapak-bapak, Ibu-ibu," tuturnya.

Demokrat: Gibran Cawapres Penanda PDIP Sukses Mengkader Calon Pemimpin

Firda Cynthia Anggrainy – detikNews

Senin, 30 Okt 2023 22:34 WIB

Jakarta - Partai Demokrat menanggapi kekecewaan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, yang merasa gagal menjadi Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP karena Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Partai Demokrat menilai majunya Gibran sebagai bakal cawapres justru merupakan prestasi bagi PDIP karena sukses mengkaderisasi calon pemimpin bangsa.

"Sah-sah saja jika Pak Djarot memiliki pandangan demikian, sama sahnya dengan yang memiliki pandangan yang berbeda dengannya. Jika penerimaan Mas Gibran menjadi bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju dianggap sebagai bentuk pembangkangan dan tidak loyal, publik juga bisa berpandangan justru PDIP sebagai partai politik telah berhasil menjalankan fungsi parpol antara lain menyiapkan kader-kader calon pemimpin nasional," kata Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (30/10/2023).

Kamhar menyinggung kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Menurutnya, majunya Gibran di kontestasi pilpres menandakan suksesnya PDIP mengkader calon pemimpin bangsa.

"Kader-kader bangsa yang nasionalis yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai yang utama, di atas kepentingan kelompok dan golongan. Jadi ketika kader, dalam hal ini Mas Gibran, memenuhi panggilan sejarah untuk mendarmabaktikan diri bagi bangsa dan negara sebagai bacawapres, sejatinya ini menjadi penanda suksesnya PDIP dalam mengkader calon-calon pemimpin bangsa. Ini sebuah prestasi," ungkap Kamhar.

"Kecuali kalau Pak Djarot beranggapan bahwa loyalitas terhadap partai tingkatannya lebih utama dari pada memenuhi panggilan Ibu Pertiwi," imbuhnya.



Kamhar meyakini publik telah memahami langkah Gibran menemui Ketua DPP PDIP sebelumnya sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Publik juga mengikuti dan memahami, bahwa Mas Gibran sebelumnya juga telah menjadi anggota Puan untuk menyampaikan perihal ini. Hemat kami, Mas Gibran telah

menempuh cara-cara yang kesatria yang menjunjung tinggi adab dan etika dalam berpolitik," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat mengaku merasa gagal menjadi Ketua Bidang Ideologi PDIP. Salah satu kegagalan itu, kata Djarot, soal Gibran yang menjadi cawapres Prabowo Subianto.

"Saya gagal. Di beberapa hal saya gagal. Termasuk misalnya pembangkangan Mas Gibran, misalnya," kata Djarot dalam diskusi Ganjar Center, di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (30/10).

Media Asing Soroti Gibran Maju Cawapres, Sebut Demokrasi Indonesia Mati

Inkana Izatifiqa R Putri – detikNews

Kamis, 02 Nov 2023 21:35 WIB

Jakarta - Situasi politik di Indonesia terus menjadi sorotan berbagai media asing setelah sosok Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Salah satunya adalah media asal Jerman, Handelsblat. Dalam tulisannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya membangun dinasti politik. Langkah politik Jokowi tersebut juga dianggap mematikan demokrasi di Indonesia. Handelsblatt juga menyatakan bahwa kondisi itu pun dianggap sebagai pembangunan politik yang sangat problematis.

"Fakta bahwa Gibran yang berusia 36 tahun akan segera mengambil peran sentral di tingkat nasional adalah berkat keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi pekan lalu," tulis Handelsblatt.

Media asing tersebut juga mengutip soal keterangan Jokowi yang berkali-kali membantah ikut campur dalam urusan politik di akhir masa jabatannya. Namun, nyatanya Jokowi disebut terlibat dan turut mencampuri urusan politik.

"Secara resmi, Jokowi membantah mengerjakan bisnis keluarga politiknya sendiri. Ketika ditanya tentang hal ini, dia menekankan di masa lalu bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam keputusan anak-anaknya. Selain itu, pada akhirnya, orang-orang memutuskan siapa yang akan menerima kekuasaan," lanjut isi tulisan Handelsblatt.

Keputusan MK yang dipimpin Anwar Usman, yang juga adik ipar dari Jokowi dan paman Gibran turut menjadi sorotan.

"Menurut keputusan hakim, orang-orang muda yang sudah memiliki pengalaman politik di tingkat daerah juga akan diterima di masa depan - seperti Wali Kota Gibran. Kritikus bereaksi dengan marah terhadap keputusan tersebut dan menuduh pengadilan nepotisme mendukung keluarga presiden. Mereka menunjukkan bahwa hakim konstitusional tertinggi adalah saudara ipar Jokowi dan paman Gibran," demikian tulisan Handelsblatt.

Sementara pengamat politik Adi Prayitno mengatakan komentar dan tulisan media asing sebagai bentuk kritik kepada Indonesia.



Media asing melihat fenomena politik politik mutakhir Indonesia. Terutama yang dinilai merestui dan mendoakan keluarganya juga terjun ke dunia ketika dikonfirmasi wartawan.

Selain itu, Adi juga menilai media asing itu juga terlihat menyoroti putusan MK yang kontroversial yang dijadikan parameter menilai demokrasi Tanah Air.

"Kritik pihak luar itu mesti dilihat sebagai vitamin untuk perbaikan," kata dia.

Sebelumnya, sorotan media mancanegara sudah pernah mengarah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laman TIME mengunggah artikel berjudul 'Indonesian Presidential Candidate Names Current President's Son as Running Mate'.

Artikel yang tayang pada Senin (23/10/2023) pukul 03.05 EDT itu secara khusus mengupas peluang Jokowi tetap memainkan pengaruhnya setelah masa kepresidenannya berakhir tahun depan. TIME menulis Jokowi sudah berkali-kali menepis anggapan soal Presiden Ketujuh RI itu cawe-cawe pada penentuan capres-cawapres.

"Namun, Gibran sebagai wakil presiden bisa memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memainkan peran penting dalam mengarahkan negeri dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara setelah periode keduanya berakhir pada Oktober 2024," demikian ditulis TIME.

PDIP Pastikan Tak Tarik Menteri dari Kabinet Usai Gibran Cawapres Prabowo

Helmy Akbar – detikNews

Minggu, 05 Nov 2023 15:28 WIB

Jakarta - PDIP memastikan tak akan menarik kadernya dari kursi menteri Kabinet Indonesia Maju usai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping bacapres Prabowo Subianto. PDIP menekankan partainya tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal itu diungkapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto se usai membuka Rakorda DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Minggu siang (5/11/2023). Hasto mengakui Jokowi telah berubah seiring putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres koalisi lain.

"Komitmen kami meskipun beliau (Jokowi) sudah berubah, tetapi tugas PDIP untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan. Sehingga kami mengawal sebagai satu kesatuan sampai akhir tugas," kata Hasto dilansir detikbali, Minggu (5/11/2023).

Hasto menyebut PDIP lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ketimbang manuver politik belaka. "Maka menteri PDIP tetap menjalankan tugas bagi bangsa dan negara. Itu jauh lebih dikedepankan daripada sekadar manuver politik," imbuh Hasto.

Hasto tak menampik Jokowi kini memilih jalan yang berbeda dengan partai yang mengusungnya hingga menjadi presiden dua periode. Menurutnya, PDIP tetap mengawal Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Terkait pemilu, kami memiliki pilihan yang berbeda (dengan Jokowi). Ganjar-Mahfud bukan hanya sekadar pemimpin yang bersih, jujur, berpengalaman, tetapi juga yang menegakkan prinsip keadilan yang tidak dimanipulasi dengan kepentingan keluarga,"



Jawab Soal Peran Iriana di Balik Keputusan Maju Cawapres

ah – detikNews

Senin, 20 Nov 2023 00:10 WIB

Jakarta - Isu soal Ibu Negara Iriana Joko Widodo jadi sosok yang mendorong Gibran Rakabuming Raka maju jadi cawapres di pemilu 2024 mencuat. Gibran pun merespon hal tersebut.

"Kata siapa?," kata Gibran di Taman Ismail Marzuki. Gibran menjawab pernyataan wartawan soal cawe-cawe Iriana mendorong dirinya maju Pilpres.

Gibran juga merespon soal informasi ibunya yang disebut bertemu dengan organisasi relawan Jokowi bahkan dengan para pengusaha untuk mendapatkan dukungan. Gibran mengatakan hal tersebut tidakkah benar.

"Nggak benar. Tanya aja ke relawan pernah nggak ketemu. Oh Hipmi apalagi (nggak bertemu)," ujarnya.

TKN Bilang Gibran Kantongi Izin Iriana

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merespons isu soal Ibu Negara Iriana Joko Widodo jadi sosok yang mendorong Gibran maju jadi cawapres. Benarkah hal tersebut?

Sekretaris TKN Nusron Wahid tidak menjawab gamblang saat ditanya hal tersebut. Namun dia mengatakan Iriana mendukung dan merestui Gibran untuk maju sebagai Cawapres.

"Ya namanya ibunya. Anaknya maju ibunya pasti mendukung mendoakan merestui," kata Nusron Wahid di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Nusron menambahkan majunya Gibran sebagai cawapres sudah atas restu Iriana. Dia mengatakan Gibran tak akan maju tanpa dukungan Iriana.

"Anaknya kan pasti minta doa restu. Kalau anaknya nggak direstui nggak mungkin mau jalan. Namanya anak durhaka," jelasnya.



LAMPIRAN III

DATA BERITA TEMPO.CO



Gibran Cawapres, Media Internasional: Jokowi Berupaya Ciptakan Dinasti Politik

Reporter:Tempo.co

Editor: Yudono Yanuar

Senin, 23 Oktober 2023 12:31 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Terpilihnya anak pertama Presiden **Jokowi**, **Gibran** Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi **Prabowo** Subianto, juga mendapat sorotan media internasional, Senin, 23 Oktober 2023.

Media terkenal Inggris, *The Guardian*, menurunkan judul *Joko Widodo's son chosen as running mate for Indonesia presidential candidate Prabowo*, dan menulis "Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun sebagai calon wakil presiden telah memicu kritik bahwa Widodo berupaya menciptakan **dinasti politik**."

Terpilihnya Gibran setelah keputusan pengadilan kontroversial pekan lalu yang memutuskan bahwa kandidat yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden jika mereka sebelumnya pernah memegang jabatan regional. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh saudara ipar Widodo, Ketua Mahkamah Agung Anwar Usman, demikian ditulis media ini.

Jokowi membantah adanya upaya untuk mendominasi politik negara tersebut, dan menegaskan bahwa pilihan pemimpin dan wakil presiden berikutnya adalah milik rakyat.

Kantor berita *Reuters* menurunkan berita bahwa terpilihnya Gibran Rakabuming bisa menjadi dorongan bagi kampanye Prabowo karena popularitas Jokowi yang sangat besar, bahkan di tengah kemarahan minggu ini atas keputusan MK untuk mengubah persyaratan kelayakan yang akan menghalangi Gibran untuk mencalonkan diri.

The Straits Times menyoroti bahwa Gibran memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden setelah keputusan kontroversial MK Senin pekan lalu. Presiden Jokowi mendapat banyak kritik karena dianggap membangun dinasti politik sebelum ia mengundurkan diri pada tahun 2024, setelah menjabat maksimal dua periode.

"Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan yang membuka jalan bagi Pak Gibran untuk mengajukan banding dipimpin oleh saudara ipar Pak Widodo, Ketua Hakim Anwar Usman," demikian ditulis media berpengaruh Singapura ini.

New Straits Times menurunkan berita dengan judul "Prabowo memilih putra presiden Indonesia sebagai cawapres". Media Kuala Lumpur ini menulis "Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, 36 tahun, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, sebagai calon wakil presiden pada pemilu bulan Februari telah memicu kritik bahwa Widodo sedang mencoba menciptakan dinasti politik di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia."

Butet Kartaredjasa Sentil Gibran Maju jadi Cawapres: Saya 40 Tahun Berteater, Baru Berani..

Reporter: Riani Sanusi Putri

Editor: Pr Anirani Yakti Widyastuti



Senin, 23 Oktober 2023 06:30 WIB

Jakarta - Seniman sekaligus budayawan, **Butet Kartaredjasa** mengkritik **Gibran** Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan umum mendatang. Butet menilai Gibran tak cukup berpengalaman dalam dunia seni. Butet sendiri pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo sekitar dua tahun.

"(Gibran) berpengalaman? Baru jalan dua tahun, tugasnya saja itu lima tahun. Dua tahun kok berpengalaman," ujar Butet dalam potongan video wawancaranya dengan Mata Najwa yang dikutip pada Senin, 23 Oktober 2023. "Sekarang sudah 40 tahun saya berteater, saya baru berani mengatakan saya berpengalaman."

Pernyataan Butet merespons Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan soal syarat capres dan cawapres yang berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Keputusan itu memuluskan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo alias **Jokowi** mendaftar sebagai cawapres.

Potongan video wawancara dengan Butet tersebut tersebar tak hanya di media sosial, tapi juga di sejumlah grup percakapan WhatsApp. Dalam video itu, Butet menilai istilah berpengalaman sebagai kepala daerah dalam putusan MK itu juga membingungkan.

Sebab, kata Butet, bagi masyarakat umum yang meniti karier, membutuhkan proses yang panjang. Ia mencontohkan, untuk menjadi manajer atau kepala bagian di sebuah kantor, pegawai perlu gigih berjuang, kemudian menjadi orang yang dipercaya dan berpengalaman sampai akhirnya naik jabatan.

Dia pun mengaku baru merasa berpengalaman sebagai aktor setelah 25 tahun bekerja dan menerima upah di bidang tersebut. Setelah proses yang panjang itu, Butet baru merasa pantas berbagi pengalamannya karena telah menjalani karier lebih dari seperempat abad.

Butet kemudian berkaca pada pengalaman dia sebagai putra dari seniman Indonesia, Bagong Kussudiardjo. Ia pun menegaskan seharusnya anak dari seorang tokoh tak menjadi benalu dari nama besar keluarga. Seharusnya, ucap Butet, ada tahapan-tahapan yang dijalani untuk mematangkan keterampilan dan kepribadian seseorang. Terlebih untuk menjadi pemimpin negara.

Selain menyoroti cara Gibran menjadi cawapres. Butet juga mengkritik proses instan Kaesang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Adapun anak kedua Jokowi itu langsung menduduki posisi Ketua Umum setelah hanya dua hari bergabung dengan partai tersebut.

Butet pun mengaku khawatir peristiwa ini memberi pelajaran buruk bagi anak muda di Indonesia. Pembelajaran buruk yang ia maksud adalah menanamkan pikiran kepada anak muda, bahwa menjadi manusia instan di Tanah Air itu memungkinkan.

"Bayangkan itu kalau nanti anak muda, anak remaja yang bertumbuh hari ini melihat peristiwa itu, oh kalau gitu aku jadi tarzan saja, gandul nama besar ayahku," ujar Butet Kartaredjasa.

Gibran Kirim Surat ke Jokowi, Izin jadi Cawapres Prabowo

Reporter: Daniel A. Fajri

Editor: Linda Novi Trianita



ber 2023 18:39 WIB

arta - Wali Kota Solo [Gibran](#) Rakabuming Raka mengirim surat kepada Widodo atau Jokowi untuk meminta izin menjadi bakal calon wakil presiden. ung [Jokowi](#), akan bersanding dengan calon presiden dari Koalisi Indonesia Subianto dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat mengatakan Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat permohonan izin dari Gibran itu pada Selasa, 24 Oktober 2023. "Mas Gibran minta izin Presiden RI, untuk dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon wakil presiden," kata Ari.

Prabowo, ditemani semua pemimpin partai koalisi pengusungnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Ahad malam 22 Oktober 2023, mendeklarasikan Gibran sebagai bakal cawapresnya. Koalisi Indonesia Maju mencakup Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, dan Partai Garuda.

Bukan hanya Gibran, Prabowo yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan, juga mengikuti aturan yang sama meminta izin kepada presiden dalam mengikuti pilpres 2024. Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, pasangan calon presiden Ganjar Pranowo, juga secara formal meminta restu Jokowi.

Publik membaca pencalonan Gibran sebagai [cawapres](#) Prabowo dalam bentuk dukungan dari Jokowi, dengan timbal balik meneruskan program-program andalannya di pemerintahan kelak nanti terpilih. Apalagi setelah putusan Mahkamah Konstitusi soal batas minimal pencalonan untuk pilpres yang dinilai kontroversial karena memberi jalan bagi dinasti politik Presiden Joko Widodo.

Ketua MK Anwar Usman, tak lain adalah adik ipar Jokowi sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka. Aturan batas usia capres-cawapres sebelumnya mewajibkan minimal 40 tahun, namun sekarang diperbolehkan lebih muda asal punya pengalaman kepala daerah. Gibran, Wali Kota Solo berusia 36 tahun, kini bisa maju ke panggung pilpres 2024.

Presiden Joko Widodo mengatakan sebagai orang tua Gibran tugasnya mendoakan dan merestui. Meskipun demikian, dia menyatakan tak ikut campur dalam pemilihan capres dan cawapres. Dia menyatakan hal itu merupakan kewenangan partai politik.

"Ya orang tua tuh tugasnya mendoakan dan merestui, keputusannya semuanya di dia (Gibran)," kata Jokowi saat menghadiri apel Hari Santri di Surabaya, pada Ahad, 22 Oktober 2023.

Disebut Keluar PDIP Secara Otomatis, Gibran Rakabuming Raka: Saya Ngikut Aja Reporter: Septia Ryanthie

Editor: Febriyan

Jumat, 27 Oktober 2023 13:11 WIB

TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo [Gibran Rakabuming](#) Raka menanggapi pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, terkait status keanggotaannya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) se usai resmi menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto. Komarudin sempat menyatakan status Gibran sebagai kader PDIP otomatis berakhir setelah resmi menjadi cawapres Prabowo.



akan mengikuti pernyataan elit PDIP tersebut. Hal itu dilontarkannya pertanyaan sejumlah wartawan di Balai Kota Solo, Jumat, 27 Oktober 2023.

"Pak Komarudin sudah ber-statement seperti itu ya. Sudah ya. Saya ngikut Komarudin sudah ber-statement seperti itu," ucapnya kepada awak media.

Gibran juga kembali ditanya perihal hasil pertemuannya dengan Ketua DPP PDIP [Puan Maharani](#) sebelum mendaftarkan diri ke KPU bersama Prabowo. Namun, ia kembali enggan menjawab secara gamblang. Ia kembali menekankan bahwa terkait hal itu sudah dibicarakannya dengan Puan dalam pertemuan mereka tersebut.

"Kan sudah saya beritahu berkali-kali, dari minggu lalu. Ada Pak Arsjad (Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar - Mahfud MD Arsjad Rasjid) juga. Sudah jelas, Mbak Puan juga sudah jelas. Tidak perlu saya ulang-ulang lagi," ujarnya.

Gibran diusung KIM untuk mendampingi Prabowo

Gibran Rakabuming Raka merupakan kader PDIP yang dicalonkan sebagai cawapres pendamping [Prabowo Subianto](#) oleh Koalisi Indonesia Maju. Koalisi itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PDIP sendiri telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai capres dan cawapres. PDIP berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Pasangan Prabowo-Gibran mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu lalu, 25 Oktober 2023. Sehari setelahnya, mereka pun menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Puan Maharani pun sempat membenarkan bahwa dirinya bertemu dengan Gibran pada Jumat pekan lalu, 20 Oktober 2023. Dalam pertemuan itu, Puan menyatakan bahwa putra sulung Presiden Jokowi itu telah berpamitan untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo.

Akan tetapi Puan menyatakan Gibran Rakabuming tak mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) miliknya atau pun mengajukan surat pengunduran diri. Sementara Ketua DPC [PDIP](#) Solo, FX Hadi Rudyatmo meminta Gibran untuk segera mengundurkan diri dan mengembalikan KTA tersebut. Soal pernyataan Rudy ini, Gibran pun menyatakan akan menemuinya.

"Oh gitu? Ya nanti saya temui Pak Rudy ya," ucap dia.

Politikus PDIP Sebut Sikap Gibran Rakabuming Raka Rugikan Partai

Reporter: Adil Al Hasan

Editor: Febriyan

Sabtu, 28 Oktober 2023 08:40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan sikap [Gibran Rakabuming](#) Raka yang tak mundur dari partainya setelah menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto merugikan partainya. Menurut Deddy, partainya berharap awalnya berharap Gibran mengundurkan diri sebelum deklarasi digelar.



aik dan terhormat itu tidak ditunjukkan sama sekali," kata Deddy saat siaran Tempo, Jumat, 27 Oktober 2023.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Keduanya sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 25 Oktober 2023.

Deddy menyatakan sikap Gibran yang tak mengundurkan diri merugikan [PDIP](#). Pasalnya, mereka mendapatkan banyak tuduhan miring.

"Karena publik menganggap PDI Perjuangan tidak tegas dan atau bermain dua kaki. Ini (tidak mundurnya Gibran) suatu sikap dan tindakan yang tidak pantas sebenarnya kalau dari sisi etika," kata dia.

Soal status Gibran di PDIP saat ini, Deddy menyatakan bahwa otomatis gugur setelah mendaftarkan diri ke KPU.

"Setahu saya, begitu Gibran memilih jalan politik yang berbeda maka otomatis keanggotaannya gugur," kata Deddy.

Soal kapan PDIP akan mengeluarkan surat keputusan soal status Gibran yang tak lagi kader partai mereka, pria yang lebih dikenal dengan nama pendek [Deddy Sitorus](#) itu menyatakan hanya masalah waktu.

"Gibran otomatis bukan lagi kader PDI Perjuangan, masalah administrasinya itu soal waktu saja," kata dia.

Puan sebut Gibran hanya pamit

Sebelumnya, Gibran enggan memastikan soal statusnya di PDIP. Dia terus menyatakan telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid.

Puan pun membenarkan adanya pertemuan dengan Gibran tersebut pada Jumat, 20 Oktober 2023. Menurut Puan, putra sulung Presiden Jokowi itu hanya pamitan untuk menjadi calon wakil presiden pendamping [Prabowo Subianto](#). Puan menyatakan tak ada pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Gibran ataupun penyerahan surat permohonan pengunduran diri.

"Enggak ada, enggak ada mengembalikan KTA, enggak ada lain-lain, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo," ujar Puan saat ditemui di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Oktober 2023.

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh [Koalisi Indonesia Maju](#). Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara PDIP di sisi lain telah mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Gibran Maju Cawapres, Hasto Sebut Proses Pencalonannya Bagian Pembangkangan Politik

Reporter: Adil Al Hasan

Editor: Eko Ari Wibowo



25 Oktober 2023 14:35 WIB

Surabaya - Wali Kota Solo **Gibran Rakabuming** Raka telah mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada 25 Oktober 2023. Sekretaris Demokrasi Indonesia Perjuangan (**PDIP**) Hasto Kristiyanto mengatakan rangkaian pencalonan Gibran sebagai cawapres adalah *political*

disobedience atau pembangkangan politik, konstitusi, dan kepada rakyat Indonesia. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.

“Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu *truf*-nya dipegang. Ada yang mengatakan *life time* saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima *Tempo* pada Ahad siang, 29 Oktober 2023.

Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan ini menjadi sorotan setelah mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan itu memberi karpet merah bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakaningbumi Raka, bisa maju jadi cawapres. Sebab Ketua MK Anwar Usman merupakan paman dari Gibran.

Hasto mengatakan partainya sedang sedih dan luka hati yang perih karena Presiden Joko Widodo atau **Jokowi** meninggalkan partai. Menurut Hasto, PDIP telah mencintai dan memberikan keistimewaan kepada presiden Jokowi.

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” kata Hasto.

Menurut Hasto, Presiden Jokowi meninggalkan PDIP karena dianggap masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Hasto tidak menyebut permintaan lain itu penjelasannya seperti apa.

“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” kata Hasto.

Menurutnya, seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP belum selesai rasa lelah setelah mendukung Jokowi dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden selama dua periode. Dukungan itu, kata Hasto, wujud rasa sayang PDIP.

“Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, para ahli hukum tata negara, tokoh prodemokrasi, dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” kata dia.

Adapun Gibran saat ditanya soal sindiran MK sebagai Mahkamah keluarga, enggan memberikan tanggapan. Menurutnya anggapan seperti itu justru hanya membuat warga resah. Ia menegaskan akan lebih fokus ke pembangunan.

"Tidak ada tanggapan. Tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu, nanti warga resah. Kita fokus pembangunan ini lho," tuturnya Senin, 16 Oktober 2023.

Ia juga menyatakan tidak begitu peduli terhadap apapun putusan MK. Apakah putusan itu menolak atau menerima gugatan, ia mengaku tidak peduli.

"Aku ra *nggagas* (tidak peduli) ditolak apa diterima. Baru tahu kalau ditolak. Beres toh, *wis mulih* (sudah, pulang)," ujarnya.



n Pimpinan Pusat (DPP) sekaligus Bendahara Umum Partai Demokrasi angan (PDIP) Olly Dondokambey mengatakan Gibran Rakabuming Raka ari partai untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo kata dia, fokus pada kemenangan pemilihan umum 2024.

“Kita sudah tidak ada agenda pembahasan pemecatan,” kata Olly kepada Tempo saat ditemui di Hotel Borobudur, Sabtu malam, 29 Oktober 2023.

Dalam kasus eks Politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko, yang terang-terangan mendukung Prabowo Subianto, Olly mengatakan saat itu masih ada waktu untuk menggelar sidang mahkamah untuk memecat mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik itu. Sedangkan, masalah Gibran Rakabuming terjadi ketika menjelang pemilihan umum, sehingga menurut Olly sudah tidak ada waktu untuk menggelar sidang mahkamah.

Menurut Olly, mekanisme dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di PDIP seseorang memang harus dipecah karena membangkang aturan, salah satunya melalui sidang mahkamah partai. Kasus Gibran Rakabuming, kata Olly, belum dilakukan sidang mahkamah.

“Yang kita pikirkan konsolidasi kemenangan, makanya belum ada rapat-rapat di luar agenda kemenangan (Ganjar-Mahfud),” kata dia.

Ketika ditanya apakah ada ketakutan bagi PDIP bahwa pemecatan Gibran Rakabuming akan menjadi bumerang yang menjatuhkan elektabilitas, Gubernur Sulawesi Utara itu tidak tegas menjawab. PDIP, kata dia, fokus pada kemenangan Ganjar-Mahfud.

Menurut Olly, kasus Gibran Rakabuming sudah jelas membangkang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Oleh karena itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga tidak ada instruksi untuk memecat putra presiden Joko Widodo itu karena dinilai sudah diatur dalam aturan partai.

“Ibu (Megawati) tidak menanggapi tentang Mas Gibran,” kata Olly. “Ibu (Megawati) hanya mengarahkan apa yang harus dilakukan sesuai pengalaman ibu waktu PDIP terinjak segala macam.”

Ketika *Tempo* bertanya apakah PDIP akan melakukan pemecatan ketika Gibran Rakabuming tidak segera mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai, Olly menyebut pembahasan mengenai status Gibran Rakabuming akan dibahas ketika usai pemilihan umum 2024.

Akademisi Singgung Gibran Semestinya Malu jadi Cawapres Dibantu Paman yang Pengaruhi Putusan MK

Reporter: Adil Al Hasan

Editor: Linda novi trianita

Rabu, 8 November 2023 07:53 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Herlambang Wiratraman mengatakan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas pelanggaran etik berat yang dilakukan Anwar Usman sudah sepatutnya Ketua Mahkamah Konstitusi itu mundur. “Malu atas pelanggaran berat yang dilakukannya,” kata Herlambang saat dihubungi, Selasa, 7 November 2023.



Usman, menurut Herlambang, Gibran Rakabuming Raka juga semestinya mundur dan mundur karena putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu calon wakil presiden secara cepat karena pamannya, Anwar Usman, yang ada di Mahkamah Konstitusi. “Pamannya (Anwar Usman) yang terlibat konflik dengan Mahkamah Konstitusi,” kata Herlambang.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK tak hanya lantaran benturan kepentingan. Ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu juga terbukti membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat capres-cawapres.

Putusan MKMK Disebut Masih Tidak Sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi

Herlambang juga apresiasi sekaligus menyesalkan putusan tersebut tidak sejalan dengan kualifikasi sanksi pemberhentian yang diberikan bagi profesi hakim yang melakukan pelanggaran etika berat. Menurut Herlambang, sesuai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 41, Anwar Usman harusnya tidak sekadar diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi biasa, tetapi diberhentikan dengan tidak hormat.

"Putusan MKMK tidak tepat memberikan hukuman bagi AU (Anwar Usman)," kata Herlambang kepada Tempo saat dihubungi Selasa malam, 7 November 2023. "Etika itu menyangkut ke profesi, sebagai hakim. Bukan ke jabatan."

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Atas pelanggaran berat itu, MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari Ketua MK.

"(Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan," kata Ketua MKMK Jimly Asshidiqie saat membacakan putusan di Gedung I MK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Kendati demikian, Jimly Asshiddiqie enggan buka suara tentang pihak yang mengintervensi paman Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu. "Tidak semuanya harus diungkap. Pokoknya itu jadi alasan kita berhenti jadi ketua," kata Jimly di Gedung I MK, Selasa, 7 November 2023.

Intervensi itu, menurut Jimly, tidak harus selalu merupakan inisiatif dari pihak yang mengintervensi. Dia mengatakan hal itu merupakan budaya feodal. "Tapi itu ada, dalam arti ya sebenarnya sudah jadi praktik di banyak tempat," kata Jimly Asshiddiqie.

Akademisi Universitas Gadjah Mada itu juga menyoroti hakim MKMK yang tidak mengungkap apa makna intervensi atau adanya pengaruh eksternal dalam putusan itu. Padahal, menurut Herlambang, hal ini bisa menjadi dasar dibukanya fakta lebih jauh soal pelanggaran etika yang memberikan pengaruh eksternal itu bisa terjadi.

"Ditulis (dalam naskah putusan) hanya satu paragraf saja," kata Herlambang.

Cawe-cawe Ibu Negara Iriana Jokowi dalam Pemilu 2024

Minggu, 19 November 2023

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka tak lepas dari peran besar Iriana Jokowi. Urusan domestik yang menghancurkan demokrasi.



balik pria sukses ada wanita hebat di belakangnya" hari-hari ini harus dikoreksi. Mengetahui sepak terjang ibu negara Iriana Joko mendorong anaknya, **Gibran Rakabuming Raka**, menjadi calon kalimat itu layak diubah menjadi "di balik dinasti keluarga, ada ibu aranya".

Ambisi **Iriana Jokowi** merupakan panci yang bertemu dengan tutupnya: Jokowi yang tak ingin kehilangan takhta, calon presiden yang sekedar ingin berkuasa, partai yang membebek "raja", dan para pendukung yang gelap mata. Liputan ini menemukan Iriana berkali-kali mengutarakan keinginannya mendorong Gibran menjadi calon wakil presiden sejak awal 2023.

Beberapa bulan sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra **Prabowo Subianto** mendekati Gibran agar bersedia mendampingi pada pemilihan presiden 2024. Selain datang ke Solo, Prabowo mengundang Wali Kota Surakarta itu kerumahnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Juni 2022.

Ambisi Iriana itu terbentur aturan syarat umur menjadi calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun. Tahun ini Gibran berusia 36. Keinginan Iriana belakangan sejalan dengan putusan **Mahkamah Konstitusi**, yang mengubah pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum dengan menambahkan kalimat "pernah terpilih dalam pemilihan kepala daerah". Putusan yang memuluskan jalan politik Gibran itu diambil Mahkamah Konstitusi yang diketuai **Anwar Usman**, paman Gibran.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai putusan itu diambil majelis yang melanggar etik dan memiliki **konflik kepentingan**. Anwar kemudian dipecat sebagai Ketua MK. Sehari sebelum putusan dibacakan, informasi yang didapat liputan ini menyebutkan Iriana sudah mengetahui putusan itu. Sekretaris jenderal PDI Perjuangan **Hasto Kristiyanto** terang-terangan menuding Istana negara mengintervensi majelis hakim.

Selain menggalang keluarga besar, Iriana aktif meminta dukungan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan ikut cawe-cawe mengatur relawan **Prabowo-Gibran**. Kepada keluarga besarnya, Iriana membantah pendapat yang menyebutkan pencalonan Gibran tergesa-gesa.

Keterlibatan istri presiden dalam kebijakan-kebijakan pejabat publik sebetulnya bukan cerita baru. Ibu Tien, istri Presiden Soeharto, misalnya, banyak mempengaruhi kebijakan suaminya dalam proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Ibu Tien diketahui juga menentukan pemilihan pejabat negara.

Suami yang tak mebatasi peran istri, apalagi membiarkan dan mendorongnya untuk cawe-cawe, sebetulnya tengah membuka pintu di praktikkannya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gunjingan di era Orde Baru: Ibu Tien merupakan Madam Ten Percent-istilah yang merujuk pada upeti 10 persen agar sebuah proyek disetujui pemerintah.

Dalam ihwal Iriana Widodo, ambisi bersengkabut dengan rasa sakit hati. Hubungan suaminya yang naik turun dengan **Megawati Soekarnoputri** dan PDI Perjuangan lada Iriana. Puncaknya dalam Rapat Koordinasi nasional PDIP pada pekan ratusan kader partai, Megawati menyebutkan, tanpa PDIP, di apa-apa. Vlog yang disebar Puan Maharani, utri Megawati, asana tak enak. Ketika itu Jokowi bertemu dengan Mega di Kantor sisi berhadaphadapan, eperti bawahan ketemu atasannya.



Yang buruk telah terjadi: urusan domestik kini mengancam masa depan **demokrasi**. Pemilihan umum yang merupakan mekanisme demokratis untuk menyeleksi pemimpin kini dibelokkan menjadi alat untuk meneruskan trah Jokowi.

Didukung mobilisasi Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian RI dan birokrasi, pasangan Prabowo-Gibran kemungkinan besar terpilih. Sejumlah dosa masa silam Prabowo, termasuk nepotisme keluarga **Jokowi**, bisa jadi dilupakan pemilih dengan kampanye ala TikTok yang dangkal dan melenakan. "Pasangan gemoy dan bocil"=istilah untuk lelaki gendut yang lucu bagi Prabowo dan pria imut kekanak-kanakan untuk Gibran-kini menjadi senjata pemikat publik.

Setelah Prabowo-Gibran dinyatakan resmi menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, masa depan Indonesia kini diada tangan pemilih. Selayaknya mereka membiarkan demokrasi Indonesia remuk di dasar jurang.

Gibran Cawapres Diklaim Wakili Anak Muda, Mimbar Mahasiswa Yogya: Kami Justru Jijik

Reporter: Pribadi Wicaksono (Kontributor)

Editor: Juli Hantoro

Rabu, 29 November 2023 21:35 WIB

TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktivis perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau **BEM** berbagai kampus menggelar aksi Mimbar Kerakyatan di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta, Rabu 29 November 2023.

Mereka berasal antara lain dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, hingga Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM).

Dalam aksi itu para mahasiswa turut menyoroti majunya **Gibran** Rakabuming Raka selaku anak Presiden Joko Widodo atau **Jokowi** sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Gibran yang lolos di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden dan wakil presiden lantas diklaim sebagai representasi anak muda dalam jalur politik.

"Kami jelas tidak mau, untuk seorang anak, yang bahkan anak seorang presiden itu diklaim perwakilan seluruh pemuda di Indonesia," kata Ketua BEM UGM Gielbran Mohammad di sela aksi.

Gielbran menuturkan sebagai bagian anak muda, dirinya justru tidak terima dengan narasi yang menyebut jika Wali Kota Solo itu telah merepresentasikan aspirasi suara pemuda.

"Kami tidak terima atas klaim itu, sebagai anak muda kami justru merasa jijik," ujar Gielbran.

"Apa yang dijalankan Presiden Jokowi dengan Gibran itu bagi kami justru hal paling najis mokrasi yang kita anut," kata dia.



sebagai cawapres Prabowo, lanjut Gielbran, dinilai tak lebih dari praktek itusi. Melalui rekayasa di lembaga Mahkamah Konstitusi.

"Relasi Gibran-Jokowi dengan Anwar Usman (eks ketua MK) dan hakim hakim lain di MK yang sudah dinyatakan melanggar etik, itu merupakan bukti empiris yang tak bisa dibantah," kata dia.

"Yang menjadi pertanyaan justru kenapa (atas proses rekayasa konstitusi di MK) masyarakat tidak menyesaki jalanan dengan kemarahan?" imbuh dia.

Yang membuat kalangan mahasiswa jijik atas majunya Gibran, ujar Gielbran, sekarang jalanan di berbagai daerah dibanjiri dengan baliho-baliho ukuran besar namun dengan gagasan kecil.

"Jadi pemuda tetap bukan sebagai subyek, tapi tetap obyek dalam pemilu ini karena yang disasar mereka hanya jumlah suara saja," kata dia.

Gielbran menuturkan, praktek kekuasaan yang dijalankan Jokowi dan keluarganya melalui kontestasi pemilu presiden 2024 telah mengancam masa depan reformasi Indonesia.

"Meskipun reformasi masih seumur jagung, janganlah dimatikan," ujar dia.

Melki Sedek Huang selaku Ketua BEM UI ditemui di sela orasinya menuturkan majunya Gibran sama sekali tak memberi keuntungan bagi generasi muda.

"Putusan MK (soal batas usia) kemarin tidak memberikan keuntungan apa pun bagi pemuda, justru melahirkan persoalan baru," kata Melki.

Putusan MK soal batas usia yang diketok Anwar Usman tersebut dinilai Melki hanya mengubah batasan umur dan frasa pengalaman kepala daerah. Tidak memiliki keberpihakan apapun pada kaum muda.

"Kalau MK (Anwar Usman) menilai kemudahan itu dari angka usia, kenapa tidak sekalian memberi kesempatan usia 17 tahun saja bisa jadi calon wakil presiden?"

"Frasa kemudahan yang lantas ditambah pengalaman sebagai kepala daerah justru memperberat anak muda di bidang politik bakal butuh ongkos politik yang lebih berat," imbuh dia.

"Jadi putusan MK ini malah menambah beban panjang bagi generasi muda untuk berpartisipasi di bidang politik di masa mendatang."

